

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerja sama yang terjalin antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig merupakan salah satu hubungan *sister city* tingkat daerah yang paling lama bertahan di Indonesia. Hubungan ini bermula pada tahun 1955 dan diinisiasikan oleh Georg Eckert sekaligus presiden dari *Internastionalen Schulbuchinstitutes* yang bertempat di Kota Braunschweig.¹ Pada saat itu, professor Georg Eckart sedang berpartisipasi dalam salah satu Konferensi Sejarawan Jerman dan Indonesia pertama yang diselenggarakan oleh UNESCO. Begitu hubungan keduanya semakin erat, barulah pada 24 Mei 1960 diresmikannya Piagam Persahabatan antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Sejak saat itulah, kedua kota mulai melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, di antaranya teknologi, pendidikan, budaya, dan ekonomi.²

Dan tentunya, Kota Bandung sebagai aktor paradiplomasi menghadapi tantangan struktural, terutama dalam aspek kepemimpinan daerah yang menjadi masalah utama dalam keberlanjutan kerja sama internasional. Terjadinya pergantian kepemimpinan yang terus-menerus menyebabkan pergeseran visi, prioritas, dan komitmen terhadap hubungan *sister city*. Setiap pemimpin baru

¹ Dian R. Azhari et al., *60 Tahun Persahabatan Kota Bandung Kota Braunschweig* (Kota Bandung: Bagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Bandung, 2020).

² Bagian Kerja Sama Kota Bandung, "Kerja Sama Kota Bandung dengan Kota Braunschweig," <https://kerjasama-new.KotaBandung.go.id/KotaBraunschweig>, (12/11/2025, 18:38 WIB).

cenderung membawa agenda pribadi dan fokus politik yang berbeda, sehingga program kerja sama *sister city* sering kali stagnan atau bahkan sampai terhenti. Aspek kepemimpinan ini menjadi salah satu variabel penting dalam paradiplomasi di Indonesia, sebab pelaksanaan hubungan luar negeri yang dijalankan daerah sangat bergantung pada komitmen individu dan keputusan politik walikota yang sedang menjabat. Hal tersebut terlihat dari pengaruh kepemimpinan di Kota Bandung yang mengakibatkan naik turunnya intensitas kerja sama, perubahan pola komunikasi dengan mitra luar negeri, dan ketidakpastian keberlanjutan program yang dikerjasamakan. Di balik potensinya yang besar sebagai kota kreatif, kota diplomasi, dan destinasi pariwisata, Kota Bandung justru kerap menghadapi hambatan internal seperti dinamika kepemimpinan yang menghambat optimalisasi paradiplomasi.³

Meskipun Kota Bandung menghadapi ketidakstabilan yang memengaruhi keberlanjutan paradiplomasinya, Kota Braunschweig tetap menjadi mitra yang relatif stabil dan konsisten semenjak 1960. Meski setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 19 Juni 2000, kerja sama keduanya sempat terhenti selama 16 tahun. MoU tersebut mencakup beberapa bidang kerja sama diantaranya ekonomi perdagangan, industri, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, teknologi, administrasi, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kepemudaan dan keolahragaan. Dan hingga saat ini, kerja sama keduanya telah berlangsung selama 66 tahun. Dan hubungan

³ Made Wahyuni and Ketut Meri Puspita Sari, "Dinamika Kepemimpinan Kepala Daerah di Masa Transisi: Kajian Strategis Atas Tantangan, Adaptasi Dan Kolaborasi Pemerintah Daerah," *Journal of Contemporary Public Administration* 5, no. 2 (November 2025): 63–71, <https://doi.org/10.22225/jcpa.5.2.2025.63-71>.

Kota Bandung dan Kota Braunschweig ini sendiri bermula sebab adanya kesamaan historis antar perguruan tinggi, yaitu *Padagogische Hochschule* di Braunschweig dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan kini disebut sebagai Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung.⁴

Akan tetapi, sejarah panjang bukanlah jaminan agar hubungan yang telah terjalin lama ini dapat berjalan dengan stabil. Dan selama enam puluh enam tahun, kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig mengalami ketidakstabilan akibat dari dinamika internal yang timbul di Kota Bandung. Dan pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia sangatlah bergantung pada faktor internal, salah satunya dalam pergantian kepemimpinan daerah. Melalui bukunya, Alexander Kuznetsov menjelaskan bahwa peran pemimpin daerah merupakan salah satu faktor paling kuat yang menentukan naik turunnya paradiplomasi di suatu daerah.⁵ Sehingga dalam hal ini, meskipun Kota Bandung dan Kota Braunschweig memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berlaku, akan tetapi, keberlanjutan kerja sama keduanya sangatlah terpengaruhi oleh faktor kepemimpinan di Kota Bandung.

Itulah mengapa penelitian ini menjadi suatu hal yang penting dilakukan karena ketidakstabilan paradiplomasi akibat faktor kepemimpinan daerah masih merupakan isu struktural yang belum banyak dikaji secara mendalam pada tingkat kota di Indonesia. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian sebab

⁴ Wisnu Teja Kusumaningjati, "Implementasi Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Tahun 2019-2021," *JIHIF (Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar)* 3, no. 1 (2024).

⁵ Alexander Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* (Routledge; 2015, n.d.), <https://doi.org/10.4324/9781315817088>.

memiliki sejarah kerja sama *sister city* terpanjang di Indonesia sekaligus mengalami pergantian kepemimpinan daerah yang terus menerus dalam satu dekade terakhir. Kondisi inilah yang menjadikan Kota Bandung sebagai kasus yang relevan untuk menganalisis bagaimana aspek kepemimpinan memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas paradiplomasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika paradiplomasi di Indonesia.⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa “Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Dalam Dinamika Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak diraih oleh peneliti adalah bagaimana kepemimpinan daerah dapat mempengaruhi dinamika kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu, peneliti berharap agar dapat menambah wawasan terkait paradiplomasi, baik secara konseptual maupun teoritik dalam kajian hubungan internasional.

⁶ Bagian Kerja Sama Kota Bandung, *Daftar Rekapitulasi Kerja Sama Pemkot Kota Bandung Dengan Mitra Kerja Sama Luar Negeri Atau Sister city Tahun 2024* (2024).

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama internasional, khususnya di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi tata kelola kerja sama luar negeri serta dapat mendukung upaya dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah sebagai aktor yang terlibat secara langsung dalam kerja sama luar negeri.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu bertujuan sebagai pembanding dengan penelitian lain, sekaligus untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti berhasil menemukan beberapa penelitian serupa, yang diantaranya sebagai berikut.

Dalam bukunya, Alexander Kuznetsov dengan judul “*Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in Internastional Affairs*” melakukan penelitian kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa paradiplomasi pemerintah subnasional merupakan suatu fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan oleh satu teori tunggal. Ia menemukan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat deskriptif dan belum memiliki kerangka analisis. Maka dari itu, ia mengembangkan sebuah kerangka analisis yang menjelaskan paradiplomasi berdasarkan beberapa aspek utama, seperti motif keterlibatan pemerintah daerah, dasar hukum, bentuk kelembagaan, hubungan dengan pemerintah pusat,

serta dampak paradiplomasi bagi negara. Melalui studi kasusnya, Kuznetsov menyimpulkan bahwa keberlangsungan paradiplomasi sangat terpengaruhi oleh stabilitas kepemimpinan daerah, kapasitas institusional, serta sikap dan dukungan pemerintah pusat terhadap aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah subnasional.⁷

Dalam penelitian ini, tentu memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexander Kuznetsov, terutama dalam penggunaan pendekatan kualitatif serta dalam melihat paradiplomasi sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pemerintah daerah. Keduanya juga menekankan pentingnya aspek kapasitas institusional, hubungan dengan pemerintah pusat, dan peran kepemimpinan dalam menentukan keberlangsungan kerja sama internasional. Dan yang membedakan terletak pada fokus pembahasannya, di mana Kuznetsov lebih teoritis dan konseptual, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan kerangka tersebut dalam konteks kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig, dengan menekankan pada dinamika kepemimpinan daerah sebagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan kerja sama.

Jurnal kedua ditulis oleh Tiara Galuh Saraswati, Reni Windiani, dan Fendy Eko Wahyudi berjudul ***“Diplomasi oleh Pemerintah Kota: Dinamika Kerja Sama Kota Kembar antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Liuzhou”***. Dalam penelitiannya menggunakan teori

⁷ Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

paradiplomasi dan konsep *sister city* serta indikator elemen kunci UNDP mengenai kerja sama antar kota. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Liuzhou tidak berjalan dengan baik. Seperti, kurangnya SDM yang memadai keberlangsungan kerja sama luar negeri, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan kurangnya timbal balik yang diberikan oleh Kota Bandung terhadap Kota Liuzhou. Ditambah lagi, pengaruh dari disposisi pimpinan menjadikan kerja sama luar negeri yang ada di Kota Bandung tidak terarah.⁸

Dan berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Galuh Saraswati dkk., yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka paradiplomasi untuk menjelaskan dinamika kerja sama *sister city* di Kota Bandung. Keduanya juga menyoroti bahwa keberlangsungan kerja sama internasional terpengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlibatan aktor lokal, serta peran kepemimpinan daerah. Disamping itu, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang digunakan, di mana penelitian Saraswati lebih menekankan pada hambatan teknis dan implementatif berdasarkan indikator *United Nations Development Programme*, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka Alexander Kuznetsov untuk menjelaskan dinamika paradiplomasi dengan menempatkan pergantian kepemimpinan daerah sebagai

⁸ Fendy Eko Wahyudi and Reni Windiani, "Diplomasi Oleh Pemerintah Kota: Dinamika Kerja Sama Kota Kembar Antara Pemerintah Kota Bandung Dengan Kota Liuzhou" (Universitas Diponegoro, 2022).

faktor penting dalam menjelaskan keberlanjutan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainal dengan judul ***“Dinamika Kerja Sama Sister city Antara Kota Bandung Dengan Kota Fort Worth Amerika Serikat”***. Zainal menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep paradiplomasi serta *sister city* untuk menjelaskan terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwasannya kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Fort Worth sudah terjalin sejak 1990 yang berawal dari kolaborasi dalam bidang teknologi kedirgantaraan antara PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan *Bell Helicopter*. Tidak hanya itu, terdapat juga kerja sama dalam sektor pendidikan melalui program *International Leadership Academy (ILA)* dan kerja sama lainnya dalam sektor ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya. Sayangnya, dalam implementasi yang dilakukan kerja sama ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kendala jarak geografis, krisis ekonomi yang pernah dialami kedua kota, serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menegaskan pentingnya interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kerja sama *sister city* yang saling menguntungkan sekaligus berkelanjutan.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi milik Zainal dalam penggunaan pendekatan kualitatif. Keduanya juga menunjukkan bahwa

⁹ Muhammad Zainal, *“Dinamika Kerja Sama Sister city Antara Kota Bandung Indonesia Dengan Kota Fort Worth Amerika Serikat”* (Universitas Fajar, 2019).

keberlangsungan kerja sama dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti anggaran, koordinasi, dan hubungan dengan pemerintah pusat. Hanya saja, yang membedakan bahwa penelitian milik Zainal ini lebih bersifat deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka Alexander Kuznetsov untuk menjelaskan dinamika paradiplomasi dengan berfokus pada pergantian kepemimpinan daerah sebagai faktor penting dalam keberlanjutan kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh BJ Tina Rosalina, Dyah Estu Kurniawati, dan Deva Joshua Kamisi berjudul ***“Bandung Cooperation with Braunschweig (Germany) in Realizing Smart City”***. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka teori paradiplomasi, diplomasi pendidikan, dan kerja sama bilateral. Penulis menjelaskan bahwa kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig telah berlangsung sejak 1960 dan tetap dipertahankan sebab adanya kesamaan karakteristik dan kepentingan dalam bidang pendidikan, lingkungan, budaya, dan teknologi. Fokus utama dalam penelitian ini berupa bagaimana kerja sama dapat mendukung indikator *smart city* Kota Bandung, terkhusus dalam aspek *smart environment* seperti pengelolaan limbah air PDAM dan *smart society* melalui festival budaya dan pertukaran pelajar. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menitikberatkan pada manfaat kerja sama dalam menunjang tujuan pembangunan kota cerdas.¹⁰

¹⁰ B; Tina Rosaliana, Dyah Estu Kurniawati, and Deva Joshua Kamisi, “Kota Bandung Cooperation with Kota Braunschweig (Germany) in Realizing Smart City,” *Journal of Paradiplomacy and City Networks* 1, no. 1 (June 2022): 1–14, <https://doi.org/10.18196/jpcn.v1i1.16>.

Persamaan yang dimiliki dari kedua penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan juga menunjukkan bahwa kerja sama kedua kota dipengaruhi oleh kesamaan kepentingan dan karakteristik. Dan yang membedakannya bahwa penelitian Rosalina lebih fokus pada manfaat dan kontribusi kerja sama terhadap pembangunan *smart city*, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka Alexander kuznetsov untuk menjelaskan dinamika paradiplomasi, dengan menekankan faktor internal seperti pergantian kepemimpinan daerah sebagai faktor penting dalam keberlanjutan kerja sama.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ivana Salsabila tentang ***“Faktor Hambatan Kerja Sama Sister city Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig”*** menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig merupakan kerja sama internasional tertua di Indonesia yang telah resmi sejak 2 Juni 1960. Kerja sama ini bermula dari hubungan akademik antara universitas di kedua kota, terkhusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Namun, begitu bergantinya Piagam Persahabatan menjadi *Memorandum of Understanding* (MoU), pelaksanaan program kerja sama keduanya justru terhenti. Hambatan kerja sama ini mencakup kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat Kota Bandung, adanya perbedaan zona waktu dan budaya, prosedur birokrasi, dan *political will* yang terus berubah antara kepemimpinan. Ivana juga menekankan bahwa meski terdapat sejarah panjang dan peluang besar, akan tetapi kerja sama yang berlangsung antara Kota

Bandung dan Kota Braunschweig belum dimanfaatkan cukup optimal karena tidak adanya strategi keberlanjutan dari pihak pemerintah Kota Bandung.¹¹

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian milik Ivana yaitu dalam penggunaan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dinamika kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Serta menunjukkan kerja sama tersebut tidak selalu berjalan optimal meski memiliki sejarah panjang. Keduanya juga menyoroti pentingnya faktor internal seperti *political will*, birokrasi, dan kapasitas pelaksanaan. Namun, penelitian milik Ivana ini cenderung deskriptif dalam mengidentifikasi hambatannya, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka Alexander Kuznetsov untuk menjelaskan dinamika paradiplomasi dengan menekankan pergantian kepemimpinan daerah sebagai faktor penting dalam menjelaskan naik turunnya keberlanjutan kerja sama.

Selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Rd. Nia Kania Kurniawati tentang ***“Implementasi Kebijakan Sister city Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman)”*** menggunakan teori kebijakan publik karya George C. Edward III. Dalam tulisannya Nia menjelaskan terkait cakupan kerja sama kedua kota tersebut dalam bidang pendidikan, budaya, ekonomi, pelatihan, pertukaran pemuda, dan pariwisata. Dan sering kali pelaksanaan kerja sama antara keduanya hanya bersifat seremonial sehingga kurang tindak lanjut secara nyata. MoU yang telah di tandatangani antar kedua belah pihak cenderung

¹¹ Ivana Salsabila, “Faktor Hambatan Kerjasama *Sister city* Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig,” *Global Insight Journal* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2774>.

sebatas pajangan semata, tanpa adanya program yang terealisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kendala besar dalam komunikasi, disposisi, sumber daya manusia, dan struktur prosedur birokrasi yang terlalu kompleks di pihak Pemerintah Kota Bandung. Beberapa hambatannya antara lain lemahnya penguasaan bahasa asing oleh staf pelaksana, tumpang tindih prosedur birokrasi, serta kurangnya motivasi politik dan komitmen dalam melanjutkan kerja sama dengan konsisten. Di dalam penelitiannya, Nia menekankan bahwa tanpa adanya perbaikan terhadap tata kelola sekaligus implementasi kebijakan, kerja sama Kota Bandung dan Kota Braunschweig ini akan hanya menjadi simbol histori tanpa memberikan dampak bagi pembangunan kota.¹²

Persamaan dalam penelitian ini dengan dengan jurnal milik Nia yaitu keduanya mengkaji kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig di mana pelaksanaannya cenderung bersifat seremonial akibat lemahnya komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi di Pemerintah Kota Bandung. Disamping itu ada juga perbedaannya di mana penelitian Nia menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edward III dan berfokus pada kendala implementasi hingga tahun 2020, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kerangka paradiplomasi Alexander Kuznetsov dengan menekankan dinamika kepemimpinan daerah periode 2016 hingga 2025 sebagai faktor utama untuk mengetahui naik turunnya kerja sama.

¹² Nia Kania Kurniawati, "Implementasi Kebijakan *Sister city* Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman)," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5, no. 1 (January 2021), <https://doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9426>.

Wisnu Teja Kusumaningjati melakukan penelitian terkait ***“Implementasi Kerja Sama Sister city Antara Kota Bandung Dan Kota Braunschweig Pada Periode 2019-2021”***, di mana ia menggunakan pendekatan kualitatif dan teori kerja sama internasional serta paradiplomasi. Wisnu menemukan bahwa kerja sama antara kedua kota tersebut menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam bidang budaya, ekonomi, dan pendidikan. Implementasi paradiplomasi yang diterapkan di nilai cukup berhasil sebab menghasilkan dampak saling menguntungkan. Beberapa kegiatan yang telah terlaksanakan meliputi promosi budaya melalui festival seni, pertukaran pemuda, pameran produk dagang, serta program pengelolaan air dan penataan kawasan sebagai contoh yaitu proyek pembangunan Sungai Cikapundung. Penelitiannya juga menekankan terkait kesamaan karakteristik antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ditambah lagi, adanya peluang kerja sama antar universitas yang mana dapat memperkuat hubungan kedua kota tersebut.¹³

Dalam penelitian ini dengan penelitian Wisnu terdapat kesamaan yaitu mengkaji *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig dengan pendekatan paradiplomasi dan kerja sama internasional, serta menyorotkan kesamaan karakteristik di bidang pendidikan, budaya, dan program nyata seperti festival seni dan lainnya. Namun dalam perbedaannya, Wisnu menyimpulkan implementasi selama periode 2019 sampai 2021 berhasil dan saling

¹³ Kusumaningjati, “Implementasi Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Tahun 2019-2021,” 2024.

menguntungkan, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Kuznetsov yang menekankan pada dinamika pergantian kepemimpinan daerah sebagai penyebab ketidakstabilan kerja sama.

Melalui jurnal berjudul ***“Paradiplomacy In Sister city Cooperation Between Bandung City and Braunschweig City”*** oleh Nabila Hana Syaskia yang membahas secara mendalam terkait kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig dalam paradiplomasi sebagai suatu upaya dalam menguatkan potensi daerah secara internasional. Dalam penelitiannya, Nabila melihat adanya kesamaan antar kedua kota tersebut seperti kebudayaan, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang mana menjadi pondasi kuat dalam pembuatan MoU tahun 2000. Program seperti pelatihan radio, pameran seni, pertukaran informasi akademik, hingga kerja sama UMKM membuktikan secara nyata hubungan keduanya. Penelitian ini kemudian menyimpulkan kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig telah menghadirkan dampak saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁴

Dan tentunya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian milik Nabila di mana keduanya menonjolkan kesamaan karakteristik kedua kota di bidang pendidikan, kebudayaan, perdagangan, dan pariwisata berdasarkan MoU tahun 2000, serta menyebut program nyata yang telah terlaksanakan. Sedangkan yang membedakan, dalam penelitian milik Nabila bersifat deskriptif dan menyimpulkan kerja sama berhasil serta memberikan dampak positif,

¹⁴ Nabila Hana Syaskia, “Paradiplomacy in *Sister city* Cooperation between Kota Bandung City and Kota Braunschweig City,” *ResearchGate*, 2022.

sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Kuznetsov dan fokus pada tantangan internal, khususnya pergantian kepemimpinan daerah yang menjadi penyebab kerja sama tidak dapat berjalan dengan stabil.

Dalam penelitian terkait **“Paradiplomasi Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Melalui Kerja Sama Sister city”** yang di tulis oleh Alin Arfia Ashari menjelaskan bahwa kerja sama antara kedua kota tersebut tidak hanya secara simbolis semata namun menghasilkan program nyata dalam bidang kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan serta berdampak secara langsung pada masyarakat. Sebagai contoh yaitu promosi budaya Jawa Barat melalui pameran *Harz und Heide* dan *World Expo*, pertukaran pemuda, pelatiham dan pameran produk UMKM. Dengan menggunakan pendekatan paradiplomasi, pemerintah Kota Bandung dapat membangun hubungan mitra yang tidak hanya semata-mata mendukung pembangunan kota secara lokal akan tetapi memperluas pengaruh yang di miliki Kota Bandung secara Internasional. Alin kemudian menggarisbawahkan pentingnya partisipasi dari masyarakat dan sektor swasta untuk mengisi program *sister city* agar tidak hanya sebatas hubungan birokratik namun menjadi bagian dari aspirasi sekaligus kebutuhan warga kota.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini dan milik Alin yaitu keduanya sama-sama mengkaji paradiplomasi *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig sekaligus membahas terkait dengan program nyata yang telah terealisasikan antara kedua kota. Namun yang membedakan, penelitian milik Alin bersifat

¹⁵ Alin Arfia Ashari, “Paradiplomasi Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Melalui Kerja Sama Sister city,” *ReasearchGate*, 2022.

deskriptif dan menekankan peran partisipasi masyarakat/swasta untuk menjadikan kerja sama lebih dari sekedar birokrasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kerangka Kuznetsov dan menonjolkan ketidakstabilan akibat pergantian kepemimpinan daerah sehingga program yang dijalankan sering kali hanya sebatas seremonial semata.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, dan Hafidz Ageng Prakoso dengan judul ***“Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020-2024”*** yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan kerangka teori paradiplomasi dari Alexander Kuznetsov, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas kerja sama internasional, yaitu keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman terhadap praktik diplomasi, serta regulasi yang belum optimal. Hambatan tersebut tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan program kerja sama, namun juga berdampak pada kredibilitas pemerintah daerah di mata mitra internasional. Penelitian dalam jurnal ini juga memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti keduanya menggunakan perspektif paradiplomasi dan fokus pada permasalahan implementasi kerja sama internasional di tingkat pemerintah daerah dan juga sama-sama menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada aspek formal, melainkan pada praktik di lapangan seperti koordinasi dan kapasitas institusional. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian oleh Hafiq ini lebih menekankan pada faktor struktural dan

administratif sebagai penyebab utama hambatan, sedangkan dalam penelitian yang disusun oleh peneliti ini lebih menyoroti dinamika kepemimpinan daerah sebagai faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig.¹⁶

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs Penulis: Alexander Kuznetsov	Kualitatif (studi konseptual -teoritis)	Kuznetsov menemukan bahwa paradiplomasi merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan dalam satu teori tunggal. Ia menemukan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya terkait paradiplomasi lebih banyak bersifat deskriptif dan tidak memiliki kerangka analisis, sehingga ia menyusun kerangka analisis untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana pemerintah subnasional dapat terlibat dalam hubungan internasional. Kerangka ini menekankan bahwa paradiplomasi terpengaruhi oleh beberapa hal utama seperti motif pemerintah daerah, dasar hukum, bentuk kelembagaan, hubungan dengan pemerintah pusat, serta dampaknya terhadap negara.
2.	Diplomasi Oleh Pemerintah Kota: Dinamika Kerja Sama Kota Kembar Antara Pemerintah Kota	Eksplanatif Kualitatif	Tersendatnya kerja sama antara kedua kota disebabkan karena tidak terpenuhinya beberapa faktor penting yang diperlukan dalam kerja sama daerah menurut UNDP. Diantaranya yaitu, elemen komitmen, keterlibatan masyarakat dalam proses dan

¹⁶ Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, and Havidz Ageng Prakoso, *Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020-2024*, 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.25751>.

	Bandung Dengan Kota Liuzhou Peneliti: Tiara Galuh Saraswati		implementasi kerja sama, serta hubungan timbal balik bagi para pihak.
3.	Dinamika Kerja Sama <i>Sister city</i> Antara Kota Bandung Dengan Kota Forth Wort Amerika Serikat Peneliti: Muhammad Zainal	Kualitatif	Terdapat dinamika kerja sama yang ditandai dengan permasalahan anggaran serta jarak antara kedua kota yang mana menjadi kendala dalam pelaksanaan setiap program kerja sama, contohnya <i>International Leadership Academy</i> (ILA) yang tidak berjalan lancar akibat krisis ekonomi yang pernah dihadapi serta masalah transparansi pelaksanaan kerja sama.
4.	<i>Kota Bandung Cooperation with Kota Braunschweig (Germany) in Realizing Smart City</i> Peneliti: BJ Tina Rosalina, Dyah Estu Kurniawati, dan Deva Joshua Kamisi	Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Kota Bandung telah mempertahankan kerja samanya bersama Kota Braunschweig dan didorong oleh kepentingan dalam rangka untuk membangun <i>smart city</i> . Kerja sama tersebut telah melengkapi dua indikator seperti lingkungan cerdas (<i>smart environent</i>) dan masyarakat cerdas (<i>smart society</i>).
5.	Implementasi Kerja Sama <i>Sister city</i> Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Tahun 2019-2021 Peneliti: Wisnu Teja Kusumaningjati	Kualitatif	Pengimplementasian paradiplomasi dalam kerja sama <i>sister city</i> antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig dapat dikategorikan telah berhasil sebab kedua kota saling memberikan dampak positif. Latar belakang dari kerja sama ini sendiri berada pada sistem administrasi, budaya, dan pusat pendidikan.

6.	<p>Faktor Hambatan Kerja Sama <i>Sister city</i> Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig</p> <p>Peneliti: Ivana Salsabila</p>	Deskriptif analitik	<p>Kerja sama antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig meredup usai penandatanganan MoU. Hambatan utama berupa perbedaan budaya dan bahasa, perbedaan zona waktu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, <i>political will</i> yang berbeda pada setiap kepemimpinan wali kota, dan tumpang tindih prosedur birokrasi Kota Bandung. Ditambah lagi adanya krisis utang Eropa menjadi salah satu kemunduran terjadi.</p>
7.	<p>Implementasi Kerja Sama <i>Sister city</i> Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig</p> <p>Peneliti: Rd. Nia Kania Kurniawati</p>	Deskriptif kualitatif	<p>Setelah penandatanganan MoU, tidak adanya kelanjutan terhadap kerja sama yang terjalin. Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan dalam aspek implementasi, seperti komunikasi, sumber daya termasuk juga kendala dalam berbahasa inggris, struktur prosedur birokrasi yang tumpang tindih dan disposisi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tidak terpenuhi dengan baik.</p>
8.	<p>Paradiplomacy in <i>Sister city</i> Cooperation Between Kota Bandung City and Braunschweig City</p> <p>Penulis: Nabila Hana Syaskia</p>	Kualitatif	<p>Kerja sama ini didasari dengan kesamaan karakteristik dari kedua kota, terutama sebagai pusat pendidikan sebab keduanya sama-sama memiliki perguruan tinggi keguruan, termasuk pariwisata, budaya, perdagangan, dan kota modern berbasis teknologi. Kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak, di mana Kota Bandung telah menerima banyak sekali bantuan dan pelatihan, sementara itu Kota Braunschweig dapat memperkenalkan kotanya secara internasional.</p>

9.	Paradipomasi Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig Melalui Kerja Sama <i>Sister city</i> Peneliti: Alin Arfia Ashari	Kualitatif	Alasan paling umum kenapa Kota Bandung masih mempertahankan kerja samanya ini ialah sebab adanya kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Bandung dan Kota Braunschweig, terutama dalam bidang pendidikan, wisata, dan budaya. Kerja sama ini menguntungkan Kota Bandung sebab kota ini dapat memperkenalkan diri secara internasional dan mendorong terjadinya inovasi sekaligus pertumbuhan melalui program di bidang kebudayaan dan ekonomi.
10.	Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020-2024 Peneliti: Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, dan Hafidz Ageng Prakoso	Kualitatif dengan metode deskriptif analitis	Penelitian ini menemukan bahwa praktik paradiplomasi Kota Surabaya menghadapi empat tantangan utama, yaitu keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas regulasi dan birokrasi, serta kurangnya pemahaman terhadap praktik diplomasi. Selain itu, proses perizinan yang panjang dan ketergantungan pada pendanaan daerah turut menghambat efektivitas kerja sama internasional, sehingga berdampak pada kredibilitas dan optimalisasi hubungan dengan mitra luar negeri.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Paradiplomasi

Pertama kalinya hadir istilah paradiplomasi yaitu dalam perdebatan akademik yang dilakukan seorang ilmuwan asal Basque bernama Panayotis Soldatos di tahun 1980-an. Kata paradiplomasi tersebut merupakan hasil dari penggabungan istilah *parallel-diplomacy* menghasilkan *paradiplomacy*

di mana mengacu pada makna “*the foreign policy of non-central governments*”.¹⁷ Di samping itu, Ivo Duchacek juga memperkenalkan istilah lainnya untuk konsep ini, berupa *micro-diplomacy*.¹⁸

Dan selama perkembangan dari konsep paradiplomasi tersebut, disitulah hadirnya pendapat Alexander S. Kuznetsov yang memaparkan bahwasannya paradiplomasi merupakan suatu hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk didalamnya provinsi maupun kota dan secara langsung melakukan hubungan dengan aktor internasional demi tercapainya kepentingan atau keuntungan daerah mereka sendiri. Kuznetsov tidak melihat paradiplomasi sebagai aktivitas tambahan dari negara, melainkan bagian dari transformasi tata kelola global, di mana keaktifan dari aktor sub nasional disebabkan adanya globalisasi, desentralisasi, dan juga semakin meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah mampu menjadi aktor internasional yang otonom, selama hubungan internasional yang dilakukan tetap berada dalam hukum nasional dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri negara. Ia juga menekankan, bahwasannya paradiplomasi tidak hanya semata-mata bersifat politik, melainkan dapat

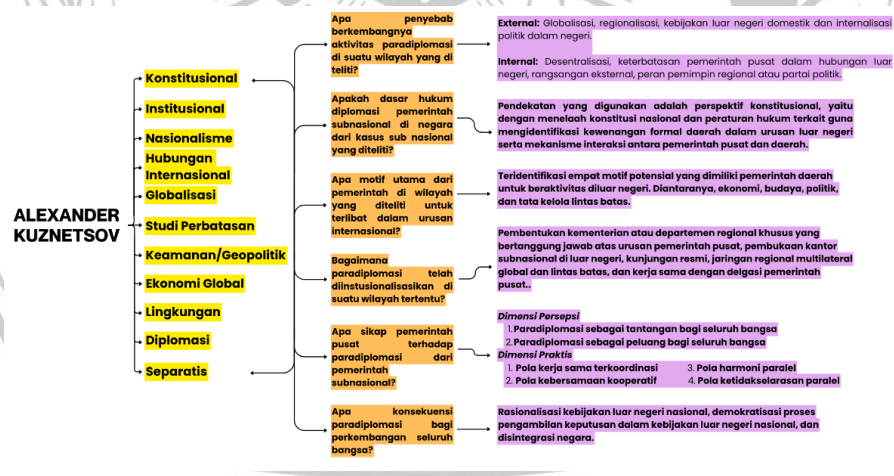
¹⁷ Francisco Aldecoa Luzárraga and Michael Keating, eds., *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*, Cass Series in Regional and Federal Studies (London: Cass, 1999).

¹⁸ David Crikemans, *How Subnational Entities Develop Their Own ‘Paradiplomacy’. The Case of Flanders (1993-2005)*, 2006.

juga terorientasikan pada ekonomi, pembangunan, inovasi, budaya, edukasi, serta kerja sama teknis lainnya.¹⁹

Kuznetsov memandang bahwa sejatinya pemerintah pusat tidak mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dengan optimal, sehingga pemerintah daerah berinisiatif dan menggunakan paradiplomasi untuk mencari sumber daya, jejaring, hingga peluang global. Dengan begitu, faktor internal daerah, salah satunya dinamika politik lokal menjadi penentu berhasil tidaknya paradiplomasi yang terjalin.²⁰ Sehingga, demi menjawab faktor-faktor tersebut, dalam penelitiannya, peneliti mengadopsi *explanatory framework* (kerangka penjelas) yang dikonstruksikan oleh Alexander Kuznetsov.

Bagan 1.1 Kerangka Penjelas Konseptual Alexander Kuznetsov 2015



Sumber: Buku Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy* (hal. 100-116)

¹⁹ Roseno Aji Affandi and Putri Utami, "Global Sustainable Challenges, Local Solutions: Paradiplomacy and Waste Management in Cirebon," *2nd International Conference on Environment and Smart Society (ICEnSO 2024)* 594 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459402003>.

²⁰ Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

Melalui sebelas dimensi yang ia jelaskan, diantaranya dimensi kontitusional, dimensi institusional, dimensi nasionalisme, dimensi hubungan internasional, dimensi globalisasi, dimensi studi perbatasan, dimensi keamanan atau geopolitik, dimensi ekonomi global, dimensi lingkungan, dimensi diplomasi, dan dimensi separatistis. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Kuznetsov melalui sebagian besar literatur terkait paradiplomasi, dari pendekatan penelitian tersebut, ia mengidentifikasi enam pertanyaan penting yang didasarkan dari kesebelas dimensi terhadap paradiplomasi yang dipaparkan dalam buku tersebut, yang kemudian digunakan untuk membahas secara menyeluruh paradiplomasi di suatu wilayah yang tengah diteliti.²¹ Diantara keenam pertanyaan tersebut, diantaranya:

1. Penyebab Berkembangnya Paradiplomasi oleh Pemerintah Subnasional

Perkembangan dari aktivitas paradiplomasi dalam suatu wilayah disebabkan oleh dua faktor utama diantaranya, faktor eksternal atau universal dan faktor internal atau domestik yang saling berkaitan. Dalam eksternal itu sendiri, paradiplomasi dipicu oleh globalisasi yang membuka peluang bagi sektor subnasional; regionalisasi mendorong redistribusi kewenangan dari pusat ke daerah; serta semakin kaburnya batas antara politik domestik dan politik luar negeri, terutama pada isu-isu *low politics*

²¹ Laode Muhammad Fathun and Elyta, "From Shadows to Spotlight: Analyzing Protodiplomatic Strategies In The 2022 Russia- Ukraine Crisis," *Jurnal Keamanan Nasional* 9, no. 2 (2023), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas>.

seperti ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Sementara itu, secara internal, paradiplomasi terdorong oleh proses desentralisasi; keterbatasan pemerintah pusat dalam hubungan luar negeri; ketidakseimbangan pemerintah subnasional; dorongan dari faktor eksternal; dan peran pemimpin regional.²²

2. Dasar Hukum Diplomasi Pemerintah Subnasional

Landasan hukum paradiplomasi dalam suatu pemerintah subnasional dapat dipahami melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri serta interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengacu pada pendekatan John Trone, kajian hukum paradiplomasi berfokus pada dua aspek utama, yaitu sejauh mana konstitusi atau hukum nasional memberikan izin kepada pemerintah subnasional untuk melakukan perjanjian paradiplomasi, serta apakah terdapat kewajiban konstitusional bagi pemerintah pusat untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dalam isu-isu internasional yang berdampak langsung pada wilayah.²³

Namun, pembahasan hukum ini memiliki keterbatasan karena aturan konstitusional sering kali tidak menunjukkan praktik sebenarnya, serta ada kemungkinan *fake constitutionalism*, yaitu kondisi ketika aturan hukum bersifat formal namun tidak berjalan secara nyata. Oleh sebab itulah, kajian dasar hukum paradiplomasi perlu dikombinasikan dengan

²² Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

²³ Luis Moreno, "Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs," 2016.

penjelasan praktik secara *de facto*, terutama perihal negara dengan tingkat kebebasan politiknya terbatas.²⁴

3. Motif Utama dari Pemerintah Daerah untuk Terlibat dalam Urusan Internasional

Di dalam bukunya, Kuznetsov memberikan empat alasan utama mengapa daerah melakukan hubungan dengan luar negeri yaitu, ekonomi, budaya, politik, dan kerja sama lintas batas. Hanya saja, beberapa pemerintah kerap kali mengejar beberapa tujuan sekaligus dalam aktivitas internasionalnya. Selain itu, keempat motif tersebut dipahami sebagai gambaran ideal, sebab dalam praktiknya hampir tidak ada daerah yang bergerak hanya dikarenakan satu alasan. Sehingga, pada akhirnya, motif yang mendorong paradiplomasi sangat memengaruhi pilihan mitra luar negeri suatu daerah dan peran yang ingin digunakan pemerintah daerah tersebut dalam paradiplomasi.²⁵

4. Penginstitutionalan Paradiplomasi oleh Pemerintah Subnasional

Terdapat beberapa cara yang sering digunakan untuk melembagakan kegiatan paradiplomasi seperti pembentukan dinas atau unit khusus di tingkat daerah yang menangani urusan luar negeri, pembukaan kantor perwakilan daerah di luar negeri, kunjungan resmi pemerintah daerah ke luar negeri, keikutsertaan dalam pameran, forum,

²⁴ Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*.

²⁵ Fitrisia Munir and Margo Purnomo, "Dimensions of the Para-Diplomacy of Border Areas in International Relations Studies: A Systematic Literature Review," *International Journal of Innovation* 10, no. 3 (2019).

maupun acara internasional yang diselenggarakan mitra luar negeri, pembentukan dan keikutsertaan dalam jaringan regional internasional atau lintas batas, keterlibatan pemerintah daerah dalam acara internasional sebagai bagian dari delegasi resmi pemerintah pusat. Selain itu, beberapa hal seperti jumlah perjanjian bilateral, pertemuan resmi, forum internasional, kantor perwakilan luar negeri dapat digunakan untuk mengukur keterlibatan suatu daerah dalam hubungan internasional.²⁶

5. Sikap Pemerintah Pusat Terhadap Paradiplomasi dari Pemerintah Subnasional

Dalam meneliti sikap pemerintah pusat terhadap paradiplomasi, terdapat beberapa cara yang digunakan diantaranya yakni, menelusuri pernyataan publik para pejabat pemerintah pusat terkait paradiplomasi, mengkaji dokumen resmi pemerintah pusat yang membahas isu tersebut, melakukan wawancara dengan para ahli atau pejabat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan berdasarkan pembahasannya, paradiplomasi dapat dipahami melalui dua cara pandang yang saling berlawanan, pertama, paradiplomasi dipandang sebagai ancaman bagi negara secara keseluruhan dan kedua, paradiplomasi dipandang sebagai peluang bagi negara secara keseluruhan. Selain itu, Alexander juga menggunakan klasifikasi Panayotis Soldatos yang membagi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam paradiplomasi

²⁶ Aji Affandi and Utami, "Global Sustainable Challenges, Local Solutions: Paradiplomacy and Waste Management in Cirebon."

menjadi empat bentuk, diantaranya pola kerja sama terkoordinasi, pola kebersamaan kooperatif, pola harmoni paralel, dan pola ketidakselarasan paralel.²⁷

6. Konsekuensi Paradiplomasi bagi Perkembangan Seluruh Bangsa

Alexander Kuznetsov mengambil beberapa pandangan, salah satunya dari John Kicaid yang menjelaskan bahwasannya ketika pemerintah daerah menggunakan panggung internasional adalah untuk menyuarkan kedaulatan atau bahkan menentang kebijakan luar negeri pemerintah pusat, dan sesungguhnya paradiplomasi bukanlah penyebab konflik dalam negeri. Menurut Kincaid, paradiplomasi justru membawa dampak positif bagi negara sebab membuka ruang demokrasi dan memperkaya proses pengambilan keputusan. Pandangan serupapun diutarakan oleh Soldatos dan Atkey, mereka menilai bahwa semakin banyak aktor dan kebijakan yang terlibat dalam hubungan internasional, justru proses perumusan kebijakan luar negeri dapat menjadi lebih rasional dan efektif. Kemudian, dari situlah setidaknya terdapat dua dampak positif paradiplomasi terhadap kebijakan luar negeri, pertama, proses pengambilan keputusan menjadi lebih rasional dan efisien, kedua, proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis karena melibatkan lebih banyak aktor. Oleh sebab itu, secara teori risiko paling utama yang kerap kali dikaitkan dengan paradiplomasi yaitu,

²⁷ Moreno, "Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs."

kemungkinan paradiplomasi mendorong kecenderungan pemisahan diri di negara-negara tertentu.²⁸

Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertanyaan nomor satu dari keenam pertanyaan hasil penggabungan dari 11 dimensi oleh Alexander Kuznetsov sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menopang dinamika yang akan diteliti. Pertanyaan yang dimaksud berupa, “Apa penyebab dari berkembangnya aktivitas paradiplomasi di wilayah yang diteliti?”. Kemudian setelah itu, Kuznetsov mengklasifikasikan penyebab dari munculnya paradiplomasi kedalam dua kategori utama untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebagaimana yang telah tertera dalam bagan penjabaran kerangka konseptual di atas. Dua kategori yang dikemukakan oleh beliau berupa penyebab eksternal atau universal, diantaranya berupa globalisasi, regionalisasi, kebijakan luar negeri domestik dan internalisasi politik dalam negeri dan penyebab internal atau domestik, yaitu desentralisasi, keterbatasan pemerintah pusat dalam hubungan luar negeri, rangsangan eksternal, peran pemimpin regional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memberikan kajian secara mendalam dengan berfokus pada situasi khusus

²⁸ Fathun and Elyta, “From Shadows to Spotlight: Analyzing Protodiplomatic Strategies In The 2022 Russia- Ukraine Crisis.”

atau hubungan internasional. Penelitian deskriptif sendiri merupakan suatu cara untuk menjelaskan data yang sudah terkumpul, terproses, yang kemudian disajikan dengan cara menilai data tersebut. Penilaian yang dilakukan disertai uraian analitik-argumentatif secara mendalam, jelas, dan terperinci. Yang kemudian uraian tersebut nantinya akan didukung dengan konsep paradiplomasi yang digunakan oleh peneliti, guna untuk memverifikasi sekaligus menjustifikasi. Dan nantinya uraian tersebut diakhiri dengan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas oleh peneliti.²⁹ Oleh karena itulah, tujuan dari digunakannya metode ini yaitu untuk menggambarkan sekaligus memahami secara mendalam terkait dinamika kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

1.6.2 Metode Analisa

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisa data kualitatif, di mana sesuai dengan permasalahan kompleks yang tengah diteliti. Tidak hanya itu, teknik ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang sulit dimengerti.³⁰ Untuk melengkapi analisa yang ada dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data pendukung yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan dinamika kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

²⁹ Andy Alfatih, *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (2017).

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa pengumpulan data primer serta didukung dengan data sekunder. Data primer yang di ambil dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dengan pihak Bagian Kerja Sama Kota Bandung. Tidak hanya itu, untuk data sekundernya sendiri diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti *Memorandum of Understanding (MoU)*, daftar rekapitulasi kerja sama Kota Bandung dengan Kota Braunschweig sejak ditandatanganinya MoU, laporan tahunan kerja sama Kota Braunschweig dan Kota Bandung, jurnal, skripsi, dan *e-book*.³¹

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Dalam penelitian ini, diperlukannya batasan materi agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada dinamika kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini berkisaran pada masa jabatan Ridwan Kamil menjabat hingga Muhammad Farhan yaitu mulai pada tahun 2016 hingga 2025. Dengan ditetapkannya batasan waktu tersebut oleh peneliti, sebab pada periode tahun yang diambil, kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig kembali aktif setelah enam belas tahun tidak memiliki

³¹ John W. Creswell and J David Creswel, *Research Design, Writing Center Talk over Time*, 2018.

sedikitpun program yang dijalankan. Selain itu, hadirnya masalah internal selama masa kepemimpinan, yang mana memberikan dampak secara tidak langsung terhadap dinamika kerja sama *sister city* yang terjalin di antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Sehingga, hal tersebutlah yang menjadikannya suatu hal menarik untuk di bahas secara mendalam oleh peneliti.

1.7 Argumen Pokok

Semakin berkembangnya paradiplomasi, Kota Bandung dapat dipengaruhi oleh dua faktor penyebab dari berkembangnya paradiplomasi, seperti faktor eksternal yang terdiri atas globalisasi, regionalisasi, maupun kebijakan luar negeri domestik dan internalisasi politik luar negeri, serta faktor internal dapat terdiri atas desentralisasi, keterbatasan pusat dalam hubungan luar negerinya, rangsangan eksternal, dan juga peran dari pemimpin regional yang mana mampu mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan paradiplomasi. Oleh sebab itulah, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana faktor eksternal dan internal tersebut berperan dalam mendorong munculnya paradiplomasi di Kota Bandung.

Melalui aktivitas paradiplomasi yang dilakukan Kota Bandung dan Kota Braunschweig, dapat menjadi gambaran terhadap dasar hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Kerangka hukum tersebut nantinya dapat memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama luar negeri. Namun, penelitian ini tidaklah datang dari anggapan bahwa keberadaan aturan hukum secara otomatis menjamin efektivitas kerja sama.

Keterlibatan Pemerintah Kota Bandung di dalam kerja sama *sister city* dapat didorong oleh berbagai kepentingan. Beberapa contoh diantaranya seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga kebudayaan dapat menjadi alasan terjalannya kerja sama dengan Kota Braunschweig. Melalui penelitian ini, peneliti akan mendalami bagaimana motif tersebut dipahami dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal kerja sama *sister city*.

Aktivitas dalam paradiplomasi di Kota Bandung dijalankan melalui mekanisme prosedur birokrasi tertentu di lingkungan pemerintah daerah. Adanya keberadaan unit kerja sama dan prosedur administratif dapat menjadi bagian dari upaya pengelolaan kerja sama internasional. Meski begitu, tidak dapat diketahui apakah paradiplomasi di Kota Bandung telah terinstitusionalkan secara kuat atau tidak. Maka dari itu, tingkat pelebagaan kerja sama *sister city* menjadi aspek yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pemerintah pusat tentunya memiliki peranan penting dalam menentukan ruang gerak paradiplomasi pemerintah daerah. Sikap yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap kerja sama internasional Kota Bandung dapat bersifat mengekang maupun sebaliknya, tergantung dari proses prosedur birokrasi yang nantinya dijalani oleh Kota Bandung, entah dalam mekanisme perizinan maupun koordinasi. Sehingga, melalui penelitian ini akan berupaya untuk memahami seperti apa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selama menjalankan praktik paradiplomasi.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bandung dapat memberikan konsekuensi terhadap kepentingan nasional Indonesia, tergantung seperti

apakah penggunaan dari paradiplomasi ini. Sehingga, konsekuensi ini perlu untuk ditelaah lebih lanjut untuk melihat seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dapat selaras atau justru cenderung berlawanan dengan kepentingan nasional.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	Pendahuluan 1.1 Latar Belakang masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Paradiplomasi 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisa 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Materi 1.6.4.2 Batasan Waktu 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Kependulisan
BAB II	Hubungan Kerja Sama Indonesia-Jerman dan Paradiplomasi Kota Bandung

	<p>2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Jerman</p> <p>2.2 Paradiplomasi Pemerintah Daerah Kota Bandung</p> <p>2.2.1 Penyebab dari Berkembangnya Aktifitas Paradiplomasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung</p> <p>2.2.2 Dasar Hukum Diplomasi Pemerintah Daerah Kota Bandung</p> <p>2.2.3 Motif Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam Kerja Sama <i>Sister City</i></p> <p>2.2.4 Pengintitusionalan Paradiplomasi di Kota Bandung</p> <p>2.2.5 Sikap Pemerintah Pusat Terhadap Pradiplomasi Pemerintah Daerah Kota Bandung</p> <p>2.2.6 Konsekuensi Paradiplomasi Bagi Kepentingan Nasional</p> <p>2.3 Kota Bandung Sebagai Aktor Paradiplomasi</p> <p>2.4 Kerja Sama <i>Sister city</i> Kota Bandung dan Kota Braunschweig</p> <p>2.4.1 Sejarah Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Bandung dan Kota Braunschweig</p> <p>2.4.2 Pelaksanaan Program Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Bandung dan Kota Braunschweig</p>
BAB III	<p>Dinamika Kerja Sama Paradiplomasi Kota Bandung dan Kota Braunschweig</p> <p>3.1 Faktor Eksternal Pendorong Kerja Sama Paradiplomasi Kota Bandung</p> <p>3.1.1 Dampak Globalisasi Terhadap Paradiplomasi di Kota Bandung</p> <p>3.1.2 Regionalisasi Sebagai Prasyarat Paradiplomasi di Kota Bandung</p>

	<p>3.1.3 Kebijakan Luar Negeri Daerah Kota Bandung dan Internalisasi Politik Dalam Negeri</p> <p>3.2 Faktor Internal Dalam Keberlangsungan Kerja Sama Paradiplomasi Kota Bandung</p> <p>3.2.1 Desentralisasi Sebagai Dasar Hukum Paradiplomasi Kota Bandung</p> <p>3.2.2 Keterbatasan Pemerintah Pusat dalam Hubungan Luar Negeri</p> <p>3.2.3 Peran Aktor Non-Negara Terhadap Paradiplomasi Kota Bandung</p> <p>3.2.4 Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengelolaan Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Bandung</p> <p>3.2.5 Ketidakseimbangan Kewenangan dan Kepemimpinan</p> <p>3.2.6 Pergantian Kepemimpinan Daerah Kota Bandung</p>
BAB IV	Penutup <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>
	Lampiran